

**ANALISIS ATAS LKPD PEMERINTAH KABUPATEN PULAU  
TALIABU DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : HILMAN FAUZI MUBAROK**

**NIM : 126212019**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2022**

**ANALISIS ATAS LKPD PEMERINTAH KABUPATEN PULAU  
TALIABU DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : HILMAN FAUZI MUBAROK  
NIM : 126212019**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS ATAS LKPD PEMERINTAH KABUPATEN PULAU  
TALIABU DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : HILMAN FAUZI MUBAROK**

**NIM : 126212019**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2022**

**ANALISIS ATAS LKPD PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIBU  
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun oleh: Hilman**



**Fauzi Mubarok**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing**



**Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, ASEAN CPA**

# **ANALISIS ATAS LKPD PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**Hilman Fauzi Mubarok**

*Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanegara  
Jakarta, Indonesia*

*Email: [hilman.126212019@stu.untar.ac.id](mailto:hilman.126212019@stu.untar.ac.id)*

## **ABSTRAK**

Opini BPK selaku auditor independen pemerintah merupakan pernyataan profesional BPK sebagai kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan memberikan deskripsi hal-hal yang menjadi permasalahan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Pulau Taliabu serta menganalisis dan memberikan saran peningkatan pengelolaan Laporan Keuangan Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka meraih opini WTP dari BPK.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Secara spesifik penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pulau Taliabu adalah ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Ketidapatuhan terhadap Perundang-undangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan wewenang para pengelola keuangan daerah, membuat mekanisme reward and punishment dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, meningkatkan kualitas SDM, dan menrtibkan seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam mengelola keuangan daerah.

**Kata Kunci :** Opini, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

### ***ABSTRACK***

BPK's opinion as independent auditor is BPK's professional statement as a conclusion regarding the level of fairness of the information presented in the financial statements. The purpose of this research is to analyze and provide a description of the problems in the Financial Statements in Pulau Taliabu Regency and to analyze and provide suggestions for improving financial management in Pulau Taliabu Regency in order to gain an unqualified opinion from BPK.

This study uses qualitative methods with a case study type using primary data and secondary data. Specifically, this research was conducted at the District Government of Pulau Taliabu, North Maluku Province. The results showed that the main problems in financial management in Pulau Taliabu Regency were incompatibility with Government Accounting Standards, weaknesses in the Internal Control System, and non-compliance with laws and regulations.

To overcome this problem, the Taliabu Island Regency Government needs to improve supervision over the implementation of the authority of regional financial managers, create a reward and punishment mechanism to follow up on BPK recommendations, improve the quality of human resources, and discipline all accounting entities and reporting entities in managing regional finances.

*Keywords :*     *Opinion, Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Compliance with Laws and Regulations*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji saya haturkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang memberi banyak teladan dan inspirasi. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Akuntan pada Program Profesi Akuntan (PPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Selama proses penulisan tugas akhir ini, penulis tentunya mendapatkan banyak dukungan dan doa dari keluarga, kerabat, teman, serta para dosen dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaludin Iskak, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA selaku Dosen Pembimbing serta selaku Kepala Program Studi PPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kedua orangtua penulis beserta adik-adik tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat, serta dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.
5. Istri penulis beserta anak-anak tersayang yang telah memberikan dorongan, semangat dan doa dengan penuh cinta.
6. Pimpinan dan staf BPK Perwakilan Maluku Utara yang memberikan semangat dan dukungan bagi penulis dalam masa perkuliahan hingga selama penyelesaian tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen, staf, karyawan, dan civitas akademika di PPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengetahuan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini

Saya menyadari sepenuhnya bahwa karya akhir ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak untuk memperbaiki karya – karya peneliti selanjutnya.

Jakarta, Desember 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Hilman Fauzi Mubarak'.

Hilman Fauzi Mubarak



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN AKHIR.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah .....	2
C.    Tujuan Penelitian .....	2
D.    Manfaat Penelitian .....	2
D.    Sistematika Pembahasan .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A.    Teori Agensi .....	5
B.    Teori Stewardship .....	5
C.    Opini Audit .....	6
D.    Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan .....	7
E.    Kepatuhan terhadap Perundangan-undangan .....	8
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>9</b>
A.    Jenis Penelitian .....	9
B.    Teknik Pengumpulan Data .....	10
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>11</b>
A.    Gambaran Umum Kabupaten Pulau Taliabu .....	11
B.    Hasil dan Pembahasan .....	11
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>23</b>
A.    Simpulan.....	23
B.    Saran .....	23
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Se-Provinsi Maluku Utara dalam 5 Tahun Terakhir .....	12
Tabel 4.2 Ketidaksesuaian terhadap SAP pada LHP BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu TA 2021 .....	13
Tabel 4.3 Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI pada LHP BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu TA 2021 .....	14
Tabel 4.4 Ketidapatuhan terhadap Perundang-undangan pada LHP BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu TA 2021 .....	16
Tabel 4.5 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku Utara Semester II 2021 .....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Opini BPK sendiri merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),
2. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Ketiga kriteria pemeriksaan di atas akan mempengaruhi opini yang akan diberikan kepada LKPD yang bersangkutan, semakin banyak jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikanpun akan semakin buruk. Pelanggaran yang ditemukan akan dibandingkan dengan kriteria tersebut kemudian ditentukan tingkat materialitasnya.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penilaian tertinggi yang diberikan, karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar. Dengan demikian, dapat diandalkan pengguna dengan tidak akan mengalami kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Opini WDP berarti laporan keuangan masih wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, sesuai dengan standar, namun masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan.

Pada Tahun 2022, dari 11 pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara (1 Pemerintah Provinsi, 2 kota, dan 8 kabupaten), BPK memberikan opini WTP atas LKPD TA 2021 untuk 10 pemerintah daerah dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk 1 pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.

Studi kasus dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu karena hingga tahun 2022, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu belum pernah memperoleh opini WTP dari BPK. BPK memberikan opini WDP untuk LKPD TA 2021 sedangkan dua tahun sebelumnya BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan studi kasus yang berjudul “Analisis atas LKPD Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan Laporan Auditor Independen”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, perumusan masalah atas studi kasus ini adalah:

1. Bagaimana permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu di Maluku Utara ditinjau dari Standar Akuntansi Pemerintahan?
2. Bagaimana permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu di Maluku Utara ditinjau dari Efektivitas Sistem Pengendalian Internal?
3. Bagaimana permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu di Maluku Utara ditinjau dari Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?
4. Mengapa Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu tidak pernah mendapat opini WTP dari BPK?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan memberikan deskripsi hal-hal yang menjadi permasalahan dalam LKPD Kabupaten Pulau Taliabu.
2. Menganalisis dan memberikan saran peningkatan pengelolaan LKPD Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka meraih opini WTP dari BPK.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah, sehingga lebih mudah mencari alternatif untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja serta memperoleh opini wajar tanpa pengecualian pada LKPD.
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang Audit Sektor Publik khususnya yang berkaitan dengan analisis opini BPK terhadap LKPD.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan yang diuraikan penulis pada Penelitian secara umum terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan akan diuraikan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan, selanjutnya rumusan permasalahan apa yang hendak diuraikan penulis melalui penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini.

2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Kajian Pustaka akan menguraikan berbagai teori yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini. Penulis mengambil teori tersebut berdasarkan penelitian terdahulu serta studi literatur dari berbagai buku maupun peraturan perundang-undangan. Kajian Pustaka mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh penulis melalui wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh penulis melalui studi dokumentasi yang dilakukan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Matriks Tindak Lanjut. Penelitian dilakukan selama 2 (dua bulan), yaitu sejak November s.d. Desember 2022.

4. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah melakukan penelitian yang pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hasil yang diperoleh penulis selanjutnya diuraikan pada hasil dan pembahasan. Hasil dan Pembahasan ini memuat hasil observasi, analisis dokumen, serta wawancara dengan Pejabat yang bertanggung jawab untuk Pemeriksaan BPK dan pengelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Taliabu.

5. **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan dan saran memuat tentang simpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta saran perbaikan yang diberikan oleh penulis bagi perbaikan opini atas LKPD pada Pemerintah Kabupaten Pulau Talibau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Farida. 2013. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja Mitra KPPN Medan II. Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Badan Pemeriksa Keuangan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2022.
- Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021.
- Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I pada Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021.
- Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Creswell, J. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan (Edisi Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Donaldson, Lex and Davis James H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management* Vol. 16 No. 1 : 49-65.
- Ichlas, Muhammad, Hasan Basri dan Muhammad Arfan. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol. 3 No. 4 : 76-8.
- Jensen, M. C and Meckling. W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* Vol. 3 : 305-360.
- Moleong, L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Santoso, Eli Budi. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur). Tesis. Universitas Lampung.

Teti, Safridani. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Sebagai Variabel Moderating. Tesis. Universitas Sumatera Utara.